

## KONSOLIDASI STRATEGI PENDIDIKAN LALU LINTAS MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

**Weka Indriani**

Pascasarjana PPKn UNY

[wekaindriany@gmail.com](mailto:wekaindriany@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsolidasi strategi pendidikan lalu lintas melalui PKn. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka/literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsolidasi strategi pendidikan lalu lintas dapat dilakukan melalui strategi pembelajaran PKn dan budaya disiplin berlalu lintas di sekolah. Salah satu kegiatan dalam strategi pembelajaran PKn yang harus diperhatikan yaitu kegiatan latihan. Pendekatan yang sesuai dengan latihan ini yaitu dengan mentransformasikan pembelajaran yang lebih interaktif melalui pengalaman lapangan. Selain itu, untuk menyeimbangkan antara penguasaan materi dengan praktek pembiasaan perilaku dapat dilakukan dengan strategi budaya disiplin berlalu lintas di sekolah. Strategi budaya disiplin berlalu lintas di sekolah sangat bergantung kepada kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah dapat melarang peserta didik untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah jika belum mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) dimana dalam implementasinya, kepala sekolah harus bersinergi dengan pihak lain seperti orang tua, masyarakat dan pihak kepolisian.

***Kata Kunci: konsolidasi strategi, pendidikan lalu lintas, PKn***

## CONSOLIDATION STRATEGY OF STREET PASS BY CITIZENSHIP

**Weka Indriani**

Pascasarjana PPKn UNY

[wekaindriany@gmail.com](mailto:wekaindriany@gmail.com)

### Abstract

This research is to describe consolidation strategy education of street pass by citizenship. This research was descriptive qualitative. The researcher collect the data by using literature study. The data collecting technique that researcher use was descriptive qualitative. The result of the research concluded that the consolidation strategy of street pass can be implemented by citizenship learning strategy and dicipline habbit in the school. One of learning strategy of citizenship that must be concern was practice. Approach that appropriate with this practice was transformed interactive learning using real experience. Beside, to balance learning material and practice or habbit formation it can be done by dicipline culture of street pass in the school. The strategy was depend on the headmaster of the school. Headmaster could prohibited students to bring motor cycle if they did not have driving liecense wich in the implementation must make a connection with other such as parents, society, and police.

*Keywords: consolidation strategy of street pass education, citizenship*

## A. Pendahuluan

Permasalahan lalu lintas di dunia masih menjadi masalah yang cukup serius, mengingat angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di jalan semakin meningkat. Merujuk data World Health Organization (WHO), pada 2015, sekitar 1,25 juta orang meninggal per tahun, dengan rincian satu orang meninggal setiap 25 detik di seluruh dunia. Angka korban kecelakaan lalu lintas tersebut dinilai lebih tinggi dari angka korban HIV atau pembunuhan (Ravel, 2017). Peningkatan kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Sepanjang 2014 tercatat 95.906 kasus, tahun selanjutnya 98.970 kasus, dan terakhir 2016 meningkat menjadi 105.374 kasus dengan korban meninggal dunia tercatat 25.859 orang, luka berat 22.939 orang, luka ringan 120.913 orang (Rostanti, 2017). Wakakorlantas Mabes Polri Brigjen Pol Indrajit mengatakan bahwa faktor utama kecelakaan lalu lintas bermula dari pelanggaran lalu lintas (Ravel, 2017). Setelah ditelusuri lebih lanjut, banyak kejadian kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas justru melibatkan peserta didik (Purnama, 2017).

Wakil Kapolri Komjen Pol Syarifudin mengatakan bahwa penyebab tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi tersebut karena kurangnya kesadaran untuk disiplin berlalu lintas (Movanita, 2017). Kurangnya kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik tentu disebabkan oleh berbagai faktor. Izzaty, dkk (2008: 150-151) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran disiplin pada peserta didik terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi kurangnya kesadaran disiplin pada peserta didik meliputi faktor personal. Sedangkan faktor ekstern yang mempengaruhi kurangnya kesadaran disiplin pada peserta didik meliputi latar belakang keluarga dan latar belakang masyarakat.

Dalam hal ini rendahnya kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik juga dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern (faktor personal) yang mempengaruhi rendahnya kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik diantaranya suka memberontak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap peserta didik yang suka melawan atau menentang peraturan lalu lintas. Sebagai contoh,

setiap pengemudi kendaraan bermotor sebenarnya mempunyai kewajiban untuk memiliki SIM sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009. Realitasnya, masih banyak peserta didik yang nekad untuk mengemudikan kendaraan bermotor sendiri meskipun belum mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi). Selain itu, faktor personal yang mempengaruhi kurangnya kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik yaitu peserta didik mempunyai kepribadian lemah karena lingkungan pembentuk psikis yang tidak tepat, dan sebagainya (Indriani, Skripsi, 2014: 81-88).

Faktor ekstern (latar belakang keluarga) yang mempengaruhi rendahnya kesadaran disiplin berlalu lintas peserta didik diantaranya kurang perhatian hanya pemenuhan kebutuhan materi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya sikap orang tua yang hanya memberikan fasilitas berupa kendaraan bermotor kepada anaknya, tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, orang tua mengizinkan anaknya untuk mengemudikan kendaraan bermotor sendiri meskipun belum mempunyai SIM, mengizinkan anak mengendarai kendaraan bermotor tanpa memakai helm, dan lainnya. Selain itu, latar

belakang keluarga yang mempengaruhi kurangnya kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik yaitu situasi yang memaksa karena orang tua kerja seharian dan sebagainya (Indriani, Skripsi, 2014: 88-91).

Faktor ekstern (latar belakang masyarakat) yang mempengaruhi kurangnya kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik diantaranya pengaruh *peer group* (teman sebaya). Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap peserta didik yang masih suka melanggar lalu lintas karena pengaruh teman sebaya. Sebagai contoh, peserta didik ikut-ikutan balapan liar karena diajak oleh teman. Selain itu, latar belakang masyarakat yang mempengaruhi kurangnya kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik yaitu kekangan sekolah dan lingkungan sosial yang tidak menentu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan sekolah yang kurang tegas. Sebagai contoh, sekolah mempunyai peraturan untuk tidak memperbolehkan peserta didik mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah jika belum mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi), tetapi realitasnya sekolah juga tidak mempunyai sanksi yang tegas untuk menindaklanjuti peserta didik yang melanggar peraturan

tersebut. Hal ini kemudian diperparah dengan adanya sikap masyarakat sekitar yang justru menyediakan tempat parkir di dekat sekolah sehingga peserta didik yang tidak diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor sendiri ke sekolah justru banyak yang menitipkan kendaraan bermotor di parkiran yang disediakan masyarakat sekitar (Indriani, Skripsi, 2014: 92-93).

Kuncorowati (2009: 65) menjelaskan bahwa kurangnya kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik dapat ditingkatkan secara efektif dan efisien melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Sementara, sikap yang tepat untuk menanggulangi kurangnya kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik dapat dilakukan dengan tindakan preventif, tindakan represif, tindakan kuratif dan rehabilitatif (Akhyar, 2014: 613). Dalam tataran pendidikan formal, sekolah mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik di sekolah sebagaimana Durkin (1999: 1) menjelaskan bahwa pendidikan lalu lintas di sekolah efektif untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas pada peserta didik.

Lebih lanjut, dalam menanggulangi kurangnya kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik, pihak sekolah dapat memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar aturan di sekolah. Supriadi dkk (2014: 640) mengemukakan bahwa hukuman merupakan salah satu alat pendidikan representatif yang diberikan oleh pihak sekolah terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran dalam upaya menegakkan peraturan atau tata tertib sekolah. Adanya sikap untuk menanggulangi kurangnya kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik memang dapat dilakukan melalui tindakan preventif dan tindakan represif. Tetapi tindakan preventif dan tindakan represif tersebut tidak akan efektif jika para pihak pelaksana yang terlibat pendidikan lalu lintas tidak melaksanakan perannya masing-masing dengan baik. Suroto (2014: 592) menjelaskan bahwa kekurangefektifan dalam mengimplementasikan suatu peraturan (norma) disebabkan oleh kurangnya peranan para aktor pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan (norma) tersebut. Oleh karena itu, agar upaya menanggulangi kurangnya kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik dapat berjalan efektif diperlukan upaya konsolidasi.

Konsolidasi strategi pendidikan lalu lintas dapat memperkuat peranan masing-masing pihak pelaksana. Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji konsolidasi strategi pendidikan lalu lintas melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, karena peneliti berusaha memahami suatu fenomena kemudian mendeskripsikan fenomena tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsolidasi strategi pendidikan lalu lintas melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pengumpulan data menggunakan studi pustaka/literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang dikaji. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, makalah, koran, dan hasil penelitian lainnya. Sedangkan analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dikaji.

## C. Hasil Penelitian

### 1. Guru Pendidikan Kewarganegaraan (Strategi Pembelajaran)

Strategi pembelajaran dilakukan guna mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, strategi pembelajaran dilakukan untuk membina peserta didik agar mempunyai kesadaran disiplin berlalu lintas. Di Indonesia, pendidikan lalu lintas diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Maka dari itu, Guru Pendidikan Kewarganegaraan harus jeli untuk memilah kompetensi dasar kewarganegaraan mana yang dapat mengintegrasikan pendidikan lalu lintas didalam pembelajarannya.

Setelah mengetahui kompetensi dasar kewarganegaraan mana yang dapat mengintegrasikan pendidikan lalu lintas didalamnya, selanjutnya guru menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan penyajian dan kegiatan penutup (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008: 22-25).

#### A. Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan sekurang-kurangnya meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Penjelasan singkat tentang isi pelajaran. Dengan adanya penjelasan singkat isi pelajaran oleh guru, peserta didik diharapkan mendapat gambaran secara global tentang isi pelajaran atau kompetensi yang akan dicapai.
- 2) Penjelasan relevansi isi pelajaran. Penjelasan relevansi yang dilakukan oleh guru atau kaitannya antara kegiatan isi pelajaran yang akan dipelajari peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang telah dikuasai peserta didik atau relevansinya dengan pengalaman peserta didik akan membuat peserta didik lebih cepat mempelajari sesuatu yang baru.
- 3) Penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai peserta didik. Peserta didik akan lebih cepat belajar jika ia telah mendapatkan tanda-tanda yang mengarahkan proses belajarnya. Tanda-tanda

tersebut antara lain berupa penjelasan tentang kompetensi.

Dari langkah-langkah kegiatan pendahuluan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendahuluan yang diterapkan guru Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya memuat penjelasan singkat isi pelajaran, penjelasan relevansi isi pelajaran dan penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai peserta didik. Kegiatan pendahuluan tidak memerlukan waktu yang banyak, tetapi kompetensi dasar kewarganegaraan yang hendak dicapai peserta didik harus sesuai dengan tema pendidikan lalu lintas. Hal ini bertujuan agar guru Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengintegrasikan pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

#### B. Kegiatan Penyajian

Kegiatan penyajian sekurang-kurangnya meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

##### 1) Uraian

Uraian adalah penjelasan tentang materi pelajaran yang akan dipelajari peserta didik.

Direktorat Tenaga Kependidikan (2008: 26) menjelaskan enam (6) strategi yang dapat diterapkan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menyampaikan materi pembelajaran, yaitu: (a) strategi urutan penyampaian suksesif, (b) strategi penyampaian fakta, (c) strategi penyampaian konsep, (d) strategi penyampaian prinsip, (e) strategi penyampaian prosedur, (f) strategi penyampaian aspek sikap (afektif).

Dalam menjelaskan materi pendidikan lalu lintas, guru Pendidikan Kewarganegaraan dapat menerapkan strategi penyampaian aspek sikap (afektif) karena disini guru PPKn berusaha untuk menginternalisasikan kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik. Direktorat Tenaga kependidikan (2008: 28-29) menjelaskan materi pembelajaran yang termasuk aspek sikap (afektif) yaitu

pemberian respon, penerimaan suatu nilai, internalisasi, dan penilaian.

Lebih lanjut, Direktorat Tenaga kependidikan (2008: 28-29) menjelaskan bahwa strategi penyampaian materi aspek sikap (afektif) tersebut dapat dilakukan dengan memilih salah satu metode yang sesuai yaitu: penciptaan kondisi, pemodelan atau contoh, demonstrasi, simulasi, dan lainnya. Misalnya dengan metode penciptaan kondisi: untuk mengajarkan peserta didik tertib terhadap rambu-rambu lalu lintas, dibuatlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas).

## 2) Contoh

Contoh meliputi kegiatan yang bersifat positif atau negatif baik yang konsisten maupun yang bertentangan dengan uraian. Uraian dan contoh ini merupakan tanda-tanda dan kondisi belajar yang merangsang peserta didik untuk memberikan respon terhadap isi pelajaran yang sedang dipelajarinya. Kegiatan pengajar dalam menguraikan

isi pelajaran dan memberikan contoh yang relevan dapat berbentuk uraian lisan, tulisan atau buku, media audiovisual, poster, benda sebenarnya. Pada saat memberikan uraian pengajar dapat menggunakan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, dan sumbang saran.

Dalam memberikan contoh kegiatan yang positif atau negatif terkait pendidikan lalu lintas, guru Pendidikan Kewarganegaraan dapat memberikan contoh perilaku patuh atau perilaku yang melanggar lalu lintas misalnya melalui sebuah tayangan video. Selanjutnya untuk merangsang peserta didik, dapat dilakukan diskusi agar peserta didik mampu memberikan contoh yang lain terkait perilaku patuh atau perilaku yang melanggar lalu lintas.

### 3) Latihan

Latihan adalah kegiatan peserta didik dalam rangka menerapkan materi yang sedang dipelajarinya kedalam praktik yang relevan dengan

pekerjaan atau kehidupannya sehari-hari. Latihan ini merupakan bagian dari proses pelajaran bukan tes. Dengan latihan, berarti peserta didik belajar dengan aktif tidak hanya duduk dan mendengarkan. Belajar secara aktif akan mempercepat penguasaan peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajarinya.

Pendekatan yang sesuai untuk dilakukan dalam latihan ini yaitu dengan mentransformasikan pembelajaran yang lebih interaktif baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Hal ini sejalan dengan Pendidikan Kewarganegaraan “maksimal” kerangka David Kerr (1999: 14) dimana dalam mentransformasikan didaktik ke interaktif dapat dilakukan dengan cara pekerjaan proyek, studi independen dan pengalaman lapangan.

Sebelum menentukan metode pembelajaran yang sekiranya tepat untuk diterapkan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam

pendidikan lalu lintas, terlebih dahulu kita membedakan antara satu metode dengan metode yang lain yang merupakan kategori Pendidikan Kewarganegaraan “maksimal” kerangka David Kerr yakni sebagai berikut:

a) Pekerjaan proyek

Pekerjaan proyek merupakan suatu metode mengajar di mana peserta didik baik secara individual atau kelompok diberi tugas untuk menyelesaikan kegiatan yang hasilnya dapat diamati dan diukur. Misalnya, proyek membuat maket Istana Negara, membuat maket Makam Pahlawan, membuat maket gedung DPR/MPR, dll (Gafur, 2011: 20).

b) Studi independen

Studi independen merupakan metode pembelajaran di mana peserta didik melakukan kegiatannya bukan dalam bentuk pembelajaran di kelas secara klasikal,

melainkan dengan jalan melakukan berbagai kegiatan seperti konsultasi dengan guru, instruktur, nara sumber, dan sebagainya dalam rangka menyelesaikan tugas belajarnya. Tugas belajar disini dapat berupa pembuatan makalah, penyelesaian proyek, kajian pustaka, penelitian, dll (Gafur, 2011: 16).

c) Pengalaman lapangan

Pengalaman lapangan merupakan kegiatan belajar secara langsung, praktek di lapangan kerja yang sesungguhnya. Misalnya untuk menanamkan sikap dan keterampilan tolong menolong, peserta didik ditugasi bekerja di panti asuhan yatim piatu, panti jompo atau panti singgah anak jalanan. Peserta didik ditugasi membantu kegiatan administrasi, mengumpulkan bantuan, membagikan atau menyalurkan bantuan dari masyarakat, mengantarkan

berobat ke poliklinik, dll (Gafur, 2011: 15).

Berdasarkan penjelasan metode pembelajaran diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran diluar ruang kelas melalui metode pengalaman lapangan dirasa efektif untuk dilakukan karena peserta didik langsung dihadapkan pada masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan masyarakat. Sebagai contoh, Di SMP Negeri 8 Yogyakarta, pendidikan lalu lintas diajarkan guru PPKN, Ibu Sulastri dengan menggelar aksi tertib berlalu lintas diluar sekolah (Purnandaru, 2016). Ibu Sulastri juga menambahkan bahwa tujuan aksi ini adalah mengajak peserta didik untuk mengenal norma hukum lalu lintas dan berharap peserta didiknya dapat mengingatkan diri sendiri agar tertib berlalu lintas (Saraswati, 2016). Muchamad Sepriko, salah satu peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut pun mengaku senang bisa ikut

dalam kegiatan ini karena dia mengaku sadar jika ternyata melanggar lalu lintas itu sangat berbahaya. Berikut ini ungkapan Sepriko mengenai hal tersebut (Atmasari, 2016).

“Setelah berdiri sebentar sambil bawa poster ternyata saya melihat banyak sekali pelanggaran. Saya sendiri jadi intropeksi diri karena menganggap pelanggaran, seperti tidak pakai helm itu hal yang biasa saja,” kata Sepriko.

Dari respon salah satu peserta didik diatas terkait strategi pendidikan lalu lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui pengalaman lapangan, dapat disimpulkan bahwa pengalaman lapangan merupakan metode yang tepat dan efektif untuk mengajarkan pendidikan lalu lintas.

### C. Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup sekurang-kurangnya meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

#### 1) Tes Formatif

Tes formatif adalah satu set pertanyaan atau pernyataan

untuk dijawab atau seperangkat tugas untuk dilakukan dalam mengukur kemampuan belajar peserta didik setelah menyelesaikan suatu tahap pengalaman belajar. Tes ini dapat diajukan secara tertulis atau lisan. Di samping itu untuk mengukur kemajuan peserta didik, tes merupakan bagian dari kegiatan belajar yang secara aktif membuat respon. Belajar secara aktif tersebut akan lebih efektif bagi peserta didik untuk menguasai apa yang dipelajarinya.

Karena output dari pendidikan lalu lintas yang diharapkan berupa sikap disiplin berlalu lintas, maka guru Pendidikan Kewarganegaraan dapat melakukan penilaian sikap. Guru Pendidikan Kewarganegaraan dapat melakukan penilaian observasi, penilaian diri (*self assesment*) dan penilaian “teman sejawat” (*peer assesment*). Dalam melakukan penilaian sikap disiplin berlalu lintas pada

peserta didik, guru Pendidikan Kewarganegaraan dapat memilih salah satu atau memadukan ketiga cara penilaian diatas.

## 2) Tindak lanjut

Kegiatan yang dilakukan peserta didik setelah melakukan tes formatif disebut dengan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut pendidikan lalu lintas dapat dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dengan cara mengawasi sikap peserta didik dalam berlalu lintas secara berkesinambungan. Misalnya, peserta didik yang sudah disiplin berlalu lintas dihimbau agar tetap mempertahankan sikap disiplin tersebut dan peserta didik yang masih suka melanggar lalu lintas dinasehati agar lebih disiplin dalam berlalu lintas.

## 2. Kepala Sekolah (Strategi Budaya Disiplin)

Sekolah juga dapat melakukan pendidikan lalu lintas pada peserta didik melalui budaya sekolah yang mendukung. Budaya sekolah yang

mendukung pendidikan lalu lintas yaitu budaya disiplin. Budaya disiplin dapat dijadikan solusi atas permasalahan terkait alasan mengapa Pendidikan Kewarganegaraan sulit mencapai misinya dalam hal ini misi untuk membina peserta didik agar mempunyai kesadaran disiplin berlalu lintas. Pendidikan Kewarganegaraan selama ini sulit mencapai misi sebagaimana mestinya dikarenakan kurangnya keseimbangan antara penguasaan materi dan praktek pembiasaan perilaku dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum (Sunarso dkk, 2008: 2). Maka dari itu, budaya disiplin dapat dijadikan strategi yang efektif untuk menyeimbangkan penguasaan materi dan praktek perilaku disiplin berlalu lintas tersebut. Budaya disiplin berlalu lintas di sekolah dapat dilakukan dengan cara pengaturan peserta didik yang diperbolehkan membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Misalnya, peserta didik yang diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah harus mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) terlebih dahulu, peserta didik harus memakai helm ketika

mengendarai kendaraan bermotor, dan lainnya.

Menurut Daryanto (2015: 84-90), indikator-indikator yang perlu diperhatikan dalam menegakkan kedisiplinan meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu penyusunan tata tertib, sosialisasi tata tertib, dan penegakkan tata tertib.

#### A. Penyusunan Tata Tertib

Dalam menyusun tata tertib sekolah harus memperhatikan pedoman-pedoman penyusunan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mampu melibatkan atau mengakomodasi aspirasi peserta didik dan aspirasi orangtua peserta didik
- 2) Semua aturan disiplin dan tata-tertib yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki, dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksi atas pelanggarannya, merupakan hasil kompromi semua pihak (peserta didik, orangtua, guru, guru pembimbing, dan kepala sekolah)
- 3) Harus didasarkan pada komitmen yang kuat antara semua unsur dan komponen sekolah dan konsisten dengan

- peraturan dan tata tertib yang berlaku
- 4) Tata tertib sekolah hendaknya tetap memberi ruang untuk pengembangan kreativitas warga sekolah dalam mengekspresikan diri dan mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimilikinya.
  - 5) Tata tertib sekolah jangan hanya dibuat berupa konsep yang harus dipatuhi oleh warga sekolah dengan sanksi yang sangat jelas yang dapat membuat aturan menjadi kaku, tetapi bagaimana mengkondisikan sekolah yang bisa membuat orang untuk tidak melakukan pelanggaran
  - 6) Tata tertib yang ada jangan sampai hanya dilakukan untuk menertibkan warga sekolah dari segi fisik saja, tetapi juga untuk membentuk mental disiplin agar disiplin yang terjadi bukan kedisiplinan semua yang dilakukan karena takut menerima sanksi, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa tata tertib itu memiliki nilai kebenaran sehingga perlu untuk ditaati
  - 7) Aturan disiplin dan tata tertib beserta sanksi-sanksinya terutama diarahkan untuk membangun budaya perilaku positif dan sikap disiplin di kalangan peserta didik (*self-discipline*) dan warga sekolah lainnya
  - 8) Aturan disiplin dan tata tertib beserta sanksi-sanksinya hendaknya tetap memberi ruang bagi berkembangnya kreativitas dan sikap kritis warga sekolah
  - 9) Format penyusunan aturan disiplin dan tata tertib dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Contoh model yang dapat digunakan untuk peserta didik adalah model penambahan skor dan pengurangan skor. Namun, jangan sampai mental disiplin yang ingin ditanamkan menjadi hilang karena terlalu fokus pada skor yang ada
  - 10) Aturan disiplin dan tata tertib beserta sanksi-sanksinya dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh kepala sekolah, agar semua pihak mengetahui dan memahami setiap butir aturan disiplin tersebut

11) Selain peraturan tentang pemberian sanksi, sekolah juga dapat membuat peraturan tentang pemberian penghargaan kepada warga sekolah untuk memotivasi mereka mentaati disiplin dan tata tertib sekolah

Setelah kita mengetahui pedoman penyusunan diatas, dapat disimpulkan bahwa disini peran kepala sekolah sangat penting. Penyusunan budaya disiplin sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus bisa mengakomodir semua aturan disiplin dan tata-tertib tersebut dengan melibatkan peserta didik, orangtua, guru, guru pembimbing, dan kepala sekolah.

#### B. Sosialisasi Tata tertib

Pelaksanaan tata tertib sekolah sangat tergantung pada pemahaman pihak-pihak terkait terhadap tata tertib yang disusun. Karena itu sosialisasi tata tertib perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dengan baik isi tata tertib tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam

melaksanakan sosialisasi tata tertib dikemukakan berikut ini.

1) Aturan disiplin dan tata tertib yang telah disusun, disepakati dan disahkan kepala sekolah hendaknya disosialisasikan secara berkelanjutan kepada seluruh warga sekolah, dalam hal ini peserta didik, guru, orangtua peserta didik, pegawai, dan pengurus komite sekolah. Sekolah perlu memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang sama tentang butir-butir tata tertib yang telah disepakati dan disahkan tersebut. Sosialisasi untuk orangtua peserta didik dan pengurus komite sekolah dapat dilakukan dengan cara mengirimkan tata tertib yang telah dibuat dalam bentuk tertulis kepada mereka

2) Butir-butir tata tertib sekolah dapat dibuat dalam bentuk poster afirmasi yang dipajang di majalah dinding sekolah dan/atau lokasi-lokasi strategis di lingkungan sekolah agar dapat senantiasa dilihat, dibaca dan dipahami oleh seluruh warga sekolah

Tahap sosialisasi tentu sangat penting terutama kepada orang tua peserta didik karena orang tua adalah figur yang sangat berperan dalam melakukan pendidikan lalu lintas di rumah. Orang tua peserta didik dapat menanamkan kesadaran disiplin berlalu lintas pada anaknya melalui pemberian dasar pemaknaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari (Sadono, 2016: 77). Pemberian dasar pemaknaan disiplin berlalu lintas pada anak dapat dilakukan dengan cara misalnya pemberian pengertian kepada anak yang belum memiliki SIM agar tidak mengemudikan kendaraan bermotor sendiri, agar selalu memakai helm ketika berkendara, dan lainnya. Selain itu, cara untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada anak dapat dilakukan dengan membuat batasan; memberikan contoh; memilih kata-kata yang tepat dan efektif; konsisten dan tetap mengawasi; mengantisipasi masalah-masalah; tegas, penuh kasih sayang dan ekstra sabar; memberi *reward* dan memberikan

teguran atau hukuman (Wahyudkk, 2015: 857).

Selain itu, sosialisasi sekiranya perlu dilakukan kepada masyarakat sekitar juga. Tahap sosialisasi tentu juga penting dilakukan kepada masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar adalah figur yang sangat berperan dalam melakukan pendidikan lalu lintas di masyarakat. Hal ini akan menjadi solusi untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi terkait lingkungan sosial yang tidak menentu. Diharapkan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar, hal ini justru akan mendukung budaya disiplin yang ditegakkan oleh sekolah. Sehingga permasalahan terkait penyediaan tempat parkir oleh masyarakat sekitar untuk peserta didik yang tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor sendiri oleh sekolah karena peserta didik belum memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku selama ini akan teratasi dengan baik.

### C. Penegakan Tata Tertib

Kegiatan terpenting dalam menguji efektivitas tata tertib adalah pada pelaksanaannya. Di

sini terkait dengan sejauh mana upaya pihak sekolah dalam menegakkan tata tertib yang telah disusun. Sebab betapapun baiknya tata tertib tapi jika tidak ditegakkan secara konsekuen maka tidak akan banyak artinya dalam pengembangan budaya sekolah. Beberapa pertimbangan dalam penegakkan tata tertib dikemukakan berikut ini.

- 1) Disiplin dan tata tertib sekolah berlaku untuk semua unsur yang ada di sekolah tidak terkecuali kepala sekolah ataupun guru dan staf harus patuh dan taat pada peraturan sekolah yang berlaku dan menjadi komitmen yang kuat dan mengikat
- 2) Sikap, perilaku, dan tindakan kepala sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya, hendaknya menjadi model dan teladan bagi penegakkan perilaku tertib dan disiplin di sekolah
- 3) Memberikan penghargaan sebagai teladan kepada guru, peserta didik dan staf yang tidak pernah melakukan pelanggaran selama kurun waktu tertentu dan diumumkan secara aklamasi pada saat pelaksanaan upacara
- 4) Penegakkan disiplin dilakukan secara bertahap kepada semua unsur yang ada di sekolah mulai dari peringatan, teguran, percobaan, penundaan, demosi dan PHK atau dikeluarkan sampai masalah itu terpecahkan atau dihilangkan
- 5) Terhadap pelanggaran-pelanggaran, dengan cepat dilakukan tindakan kedisiplinan
- 6) Penegakan tata tertib terutama difokuskan pada upaya membantu peserta didik dan semua warga sekolah untuk menyesuaikan diri dengan setiap butir dalam aturan tata tertib tersebut
- 7) Penjatuhan hukuman (eksekusi) atas pelanggaran tata tertib hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan maksud positif dari pengambilan tindakan tersebut. Peserta didik yang menerima bentuk sanksi tersebut sebagai bentuk intervensi bagi kebaikan yang bersangkutan
- 8) Sanksi penegakan tata tertib sekolah dilakukan kepala sekolah atau wakil kepala

sekolah urusan kepeserta didikan.

- 9) Penegakkan tata tertib merupakan bagian dan terintegrasi dengan upaya membangun budaya perilaku etik dan sikap disiplin, baik di lingkungan internal sekolah maupun di lingkungan luar sekolah
- 10) Ada konsistensi/kesepakatan di antara para guru dan kepala sekolah mengenai prosedur-prosedur dan bentuk hukuman bagi peserta didik pelanggar disiplin dan tata tertib
- 11) Eksekusi terhadap pelanggar tata tertib berat, khususnya yang berkonsekuensi skorsing atau pemecatan, ditetapkan melalui pertemuan konferensi kasus yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, konselor sekolah, pengurus OSIS, dan wakil komite sekolah
- 12) Eksekusi terhadap pelanggar tata tertib berat yang berkonsekuensi skorsing atau pemecatan dilakukan oleh kepala sekolah setelah semua upaya persuasi untuk

perbaikan perilaku telah dilakukan secara maksimal

- 13) Penghargaan dapat diberikan kepada warga sekolah dalam rangka penegakan tata tertib sekolah seperti pemberian reward kepada mereka yang tidak pernah melakukan pelanggaran selama tiga bulan, satu semester sampai satu tahun
- 14) Orangtua peserta didik perlu diberikan pemahaman tentang kebijakan sekolah tentang kedisiplinan agar orangtua merasa dihargai dan dilibatkan sehingga dapat memberikan dukungan terhadap dukungan pelaksanaan tata tertib sekolah

Dari hal diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakkan disiplin berlalu lintas di sekolah sangat penting. Upaya penegakan budaya disiplin berlalu lintas di sekolah sekiranya juga perlu melibatkan pihak kepolisian karena pihak kepolisian akan membantu membina peserta didik agar mempunyai kesadaran untuk disiplin berlalu lintas. Pihak kepolisian dapat melakukan upaya represif dalam membina

peserta didik agar disiplin berlalu lintas yaitu dengan cara menjatuhkan sanksi bagi peserta didik yang melanggar lalu lintas (Anggarasena, tesis, 2010: 87).

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Guru Pendidikan Kewarganegaraan (Strategi Pembelajaran)**

Pendidikan lalu lintas adalah pendidikan yang bertujuan untuk membina peserta didik agar mempunyai kesadaran disiplin berlalu lintas. Di Indonesia, pendidikan lalu lintas diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Maftuh & Sapriya (2005: 321) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum mempunyai salah satu misi yaitu untuk membina peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, menyadari akan hak dan kewajibannya, dan memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tugas dalam melakukan pendidikan lalu lintas di sekolah.

Dalam kegiatan belajar mengajar, strategi pembelajaran merupakan hal yang penting karena strategi pembelajaran dapat menciptakan kondisi belajar yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran (Daryanto, 2015: 63). Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk memilih dan mempergunakan strategi pembelajaran yang tepat dalam membina peserta didik menjadi warga negara yang mempunyai kesadaran disiplin berlalu lintas. Salah satu kegiatan dalam strategi pembelajaran yang harus diperhatikan yaitu kegiatan latihan, karena latihan merupakan kegiatan peserta didik dalam rangka menerapkan materi yang sedang dipelajarinya kedalam praktik yang relevan dengan pekerjaan atau kehidupannya sehari-hari.

Pendekatan yang sesuai dengan pendidikan lalu lintas yaitu dengan mentransformasikan pembelajaran yang lebih interaktif, salah satunya bisa dilakukan dengan pengalaman lapangan. Metode pengalaman lapangan dapat dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai metode

yang efektif dalam pendidikan lalu lintas di sekolah. Melalui metode lapangan, peserta didik memperoleh pengalaman langsung yang bermakna dari pembelajaran di luar kelas. Dari pengalaman tersebut, peserta didik diharapkan mempunyai kesadaran disiplin berlalu lintas yang baik dan dapat mengaplikasikan disiplin berlalu lintas tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan memang mempunyai tanggung jawab dalam mengemban misi pendidikan lalu lintas di sekolah. Namun, tanggung jawab yang besar ini pastinya tidak cukup hanya dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan saja. Ada pepatah “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Maka dari itu, diperlukan konsolidasi strategi pendidikan lalu lintas dalam mewujudkan misi tersebut. Konsolidasi disini berfungsi untuk menguatkan peranan masing-masing pihak pelaksana yang terlibat dalam pendidikan lalu lintas. Dengan adanya konsolidasi tersebut, maka seluruh pihak pelaksana pendidikan lalu lintas menjadi suatu kolektifitas yang kuat.

Konsolidasi strategi pendidikan lalu lintas disini bertujuan untuk melakukan penguatan ikatan antara guru Pendidikan Kewarganegaraan melalui strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan kepala sekolah melalui Budaya disiplin berlalu lintas. Budaya disiplin berlalu lintas di sekolah digunakan untuk menyeimbangkan antara penguasaan materi yang telah diupayakan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan melalui strategi pembelajaran (menyangkut ranah kognitif dan psikomotorik), dengan praktek pembiasaan perilaku disiplin berlalu lintas (menyangkut ranah afektif). Dengan adanya strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan budaya disiplin berlalu lintas di sekolah, semua ranah (kognitif, psikomotorik, dan afektif) peserta didik dalam pendidikan lalu lintas dapat tercover dengan baik di sekolah.

## **2. Kepala Sekolah (Strategi Budaya Disiplin)**

Budaya disiplin berlalu lintas di sekolah tidak hanya bergantung kepada kepemimpinan kepala sekolah saja, tetapi dalam

mengimplementasikan budaya disiplin agar lebih efektif, kepala sekolah harus bersinergi dengan pihak lain seperti orang tua, masyarakat dan pihak kepolisian.

Kepala sekolah dapat menerapkan budaya disiplin berlalu lintas dengan cara melarang peserta didik untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah jika belum mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi). Selanjutnya, kepala sekolah harus melakukan sosialisasi aturan tersebut dengan orang tua dan masyarakat. Sekolah harus memberikan sosialisasi kepada orang tua agar orang tua dapat memberikan penanaman disiplin dirumah dengan memberikan pengertian kepada anaknya agar tidak mengemudikan kendaraan bermotor sendiri jika belum mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi). Sekolah juga dapat memberikan sosialisasi dan menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung budaya disiplin sekolah dengan cara tidak menyediakan tempat parkir di sekitar sekolah. Selain itu, sekolah juga dapat bekerjasama dengan kepolisian untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik yang

melanggar budaya sekolah terkait pelanggaran disiplin berlalu lintas.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Di Indonesia, pendidikan lalu lintas diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Implikasinya, guru Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tugas dalam melakukan pendidikan lalu lintas di sekolah melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam kegiatan belajar mengajar, strategi pembelajaran merupakan hal yang penting. Salah satu kegiatan dalam strategi pembelajaran yang harus diperhatikan yaitu kegiatan latihan. Latihan adalah kegiatan peserta didik dalam rangka menerapkan materi yang sedang dipelajarinya kedalam praktik yang relevan dengan pekerjaan atau kehidupannya sehari-hari. Pendekatan yang sesuai untuk dilakukan dalam latihan ini khususnya terkait pendidikan lalu lintas yaitu dengan mentransformasikan pembelajaran yang lebih interaktif dengan pengalaman lapangan.

Selain itu, untuk menyeimbangkan antara penguasaan

materi dengan praktek pembiasaan perilaku dapat dilakukan dengan strategi budaya disiplin di sekolah. Dalam mengimplementasikan budaya disiplin tersebut, kepala sekolah harus bersinergi dengan pihak lain seperti orang tua, masyarakat dan pihak kepolisian. Kepala sekolah dapat menerapkan budaya disiplin berlalu lintas di sekolah dengan cara melarang peserta didik untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah jika belum mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi), dimana sebelumnya kepala sekolah harus melakukan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat sekitar untuk mendukung aturan disiplin tersebut. Kemudian untuk menindaklanjuti pelanggaran aturan disiplin, kepala sekolah bisa bekerjasama dengan kepolisian.

Upaya tersebut sekiranya tidak akan efektif jika para pihak pelaksana yang terlibat pendidikan lalu lintas kurang mengimplementasikan perannya masing-masing dengan baik. Oleh karena itu, agar upaya menanggulangi kurangnya kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik dapat berjalan efektif diperlukan upaya

konsolidasi. Konsolidasi strategi pendidikan lalu lintas dapat memperkuat peranan masing-masing pihak pelaksana sehingga upaya penanaman kesadaran disiplin berlalu lintas pada peserta didik (anak) dapat berjalan dengan baik.

## 2. Saran

- a) Guru PKn perlu memilih dan mempergunakan strategi pembelajaran yang tepat dalam mengintegrasikan pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran PKn di sekolah
- b) Kepala sekolah perlu bersinergi dengan orang tua, masyarakat sekitar dan kepolisian dalam mendukung implementasi budaya disiplin berlalu lintas di sekolah

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggarasena, B. (2010). *Strategi penegakkan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum*. Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Tidak diterbitkan
- Atmasari, N. (2016, Januari 14). *35 menit berdiri di tepi Jalan Diponegoro, siswa SMPN 8 Jogja temukan puluhan pelanggaran*. Solopos Online. Diakses dari <http://m.solospos.com/2016/01/14/lalu-lintas-Yogyakarta-35-menit-berdiri-di-tepi-jalan-diponegoro-siswa-smpn-8-Yogyakarta-temukan-puluhan-pelanggaran-680621>

- Daryanto. (2015). *Pengelolaan budaya dan iklim sekolah*. Yogyakarta: Gava Media
- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2008). *Strategi pembelajaran PPKN dan ilmu pengetahuan sosial*. Jakarta: PMPTK
- Durkin, M.S. (1999). *Epidemiology and prevention of traffic injuries to urban children and adolescents*. Pediatrics. Vol.103, No.6
- Gafur, A. (2011). *Model, strategi dan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Tidak diterbitkan
- Indriani, W. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas pelajar SMP Se-Kabupaten Bantul DIY*. Skripsi pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta. Tidak Diterbitkan
- Izaty, R.E dkk. (2008). *Perkembangan peserta didik*. Yogyakarta: UNY Press
- Kerr, D. (1999). *Citizenship education in the curriculum: an international review*. The School Field. Vol.X, No.3/4
- Kuncorowati, P.W. (2009). *Menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di indonesia*. Jurnal Civics. Vol.6, No.1
- Maftuh, B. & Sapriya. (2005). *Implementasi KBK PKn dalam berbagai konteks*. Bandung: Jurusan PMPKN FPIPS UPI
- Movanita, A.N.K. (2017, Juli 30). *Wakapolri sebut disiplin harus dibangun untuk kurangi kecelakaan*. Kompas Online. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/30/10381631/wakapolri-sebut-disiplin-harus-dibangun-untuk-kurangi-kecelakaan>
- Purnama, A. (2017, Februari 22). *Pelajar sering terlibat kecelakaan*. Tribun Jogja Online. Diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2017/02/22/pelajar-sering-terlibat-kecelakaan>
- Purnandaru, A.P. (2016, November 10). *Realtime news: siswa SMPN 8 Yogyakarta ajak pengguna jalan tertib lalu lintas*. Tribun Jogja Online. Diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2016/11/10/realtime-news-siswa-smpn-8-yogyakarta-ajak-pengguna-jalan-tertib-berlalu-lintas>
- Ravel, S. (2017, Januari 10). *Jurus baru polisi tekan kecelakaan lalu lintas*. Kompas Online. Diakses dari <http://otomotif.kompas.com/read/2017/01/10/171919515/jurus.baru.polisi.tekan.kecelakaan.lalu.lintas>
- Ravel, S. (2017, Maret 9). *Akibat pembiaran, angka kecelakaan tumbuh subur*. Kompas Online. Diakses dari <http://otomotif.kompas.com/read/2017/03/09/072200715/akibat.pembiaaran.angka.kecelakaan.tumbuh.subur>
- Rostanti, Q. (2017, Mei 02). *Jumlah kecelakaan di Indonesia empat tahun terakhir*. Republika Online. Diakses dari <http://m.republika.ci.id/berita/nasional/umum/17/05/02/opaywe326-jumlah-kecelakaan-di-indonesia-empat-tahun-terakhir>
- Sadono, S. (2017). *Budaya disiplin dalam berlalu lintas kendaraan roda dua di Kota Bandung*. Jurnal PKn Progresif. Vol.12, No.1
- Saraswati, A. (2016, Januari 20). *Siswa SMP N 8 Yogyakarta catat*

*pelanggaran pengendara lalu lintas.*  
Radio Edukasi Online. Diakses dari  
[http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/  
read/1254/siswa-smp-n-8-  
yogyakarta-catat-pelanggaran-  
pengendara-lalu-lintas.html](http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/1254/siswa-smp-n-8-yogyakarta-catat-pelanggaran-pengendara-lalu-lintas.html)

Sunarso, dkk. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press

Supriadi, A. (2014). *Efektivitas pemberian sanksi bagi siswa pada pelanggaran tata tertib di SMP 2 Kapuas Timur Kabupaten Kapuas*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.4, No.8

Suroto. (2014). *Kecenderungan pengurus dalam mentaati norma organisasi kemahasiswaan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.4, No.8

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Wahyu dkk. (2015). *Menanamkan nilai disiplin anak pada lingkungan keluarga di Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.5, No.10

Akhyar, Z dkk. (2014). *Perilaku menyimpang remaja Desa Sungai Alang Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.4, No.8